

Jumat Legi 10 Agustus 2012

22 Pasa 1945

Tahun LXVII No. 307

<http://www.krjogja.com> [www.kr.co.id](http://www.kr.co.id)



## Analisis

### Kebijakan Pertamina

Dr Suranto

**SEIRING** terlampauinya kuota BBM bersubsidi yang dicanangkan Pemerintah 2012 ini, Pemerintah memutuskan penggunaan bahan bakar Pertamina bagi kendaraan dinas Pemerintah, termasuk TNI dan Polri di kawasan Jawa-Bali mulai 1 Agustus 2012. Kebijakan ini akan diperluas skop wilayah dan obyeknya secara bertahap nantinya. Terlepas dari tepat tidaknya pilihan kebijakan yang ditempuh, pelaksanaan kebijakan wajib Pertamina bagi kendaraan plat merah ini akan menjadi trigger yang sangat berharga guna memprediksi potensi efektivitas pelaksanaan wajib Pertamina dalam skop yang lebih luas baik jangkauan wilayah maupun sasaran kendaraan yang dituju.

Dalam studi kebijakan, dikenal adanya 3 tahapan kebijakan yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap formulasi merupakan tahap pemilihan kebijakan yang dipandang paling baik dari serangkaian alternative kebijakan yang bisa ditempuh.

Sementara tahap implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap penilaian terkait hasil implementasi kebijakan yang diimplementasikan.

\* Bersambung hal 7 kol 1

## Kebijakan . . . . . Sambungan hal 1

Tahap formulasi kebijakan terkait BBM telah memakan waktu yang cukup lama, yang berfokus pada pilihan kebijakan menaikkan harga BBM atau menekan penggunaan BBM bersubsidi. Alternatif kebijakan menaikkan harga BBM menurut pandangan banyak pengamat secara ekonomi sangat feasible dan efektif dilakukan untuk menanggulangi jebolnya subsidi BBM dalam APBN.

Apabila dicermati sebenarnya ada pertimbangan lain mengapa Pemerintah menempuh kebijakan ini, yaitu ketidakberdayaan melawan tekanan kekuatan kapitalis internasional yang memiliki kepentingan untuk memasuki pasar Indonesia yang sangat besar. Perusahaan asing seperti Shell dan Caltex sangat antusias melakukan penetrasi ke negeri ini, namun terkendala oleh kebijakan subsidi BBM yang membuat posisi mereka kalah bersaing. Dengan diterapkannya kewajiban penggunaan Pertamina di Indonesia, mereka berharap dapat menguasai pasar domestik mengingat harga Pertamina yang fluktuatif tergantung dinamika pasar dan produsen hulunya dikendalikan oleh mereka. Kita bisa bayangkan beberapa tahun mendatang maraknya SPBU asing sebagaimana terlihat dari menjamurnya Alfamart, K-Mart, Indomart dan pasar modern yang telah mengalahkan keberadaan pasar tradisional seperti saat ini.

*(Penulis, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada Jusuf Kalla School of Government UMY)-a*